



Dampak Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terhadap Peningkatan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022

Tarisa Dana Shobiha^{1*}, Diana Zuhroh², Tjandra Wasesa³, Sutini⁴, Wiratna⁵

¹⁻⁵ Universitas 45 Surabaya, Indonesia

Email: tarisadanashobiha@gmail.com^{1*}

Alamat: Jl. Mayjen Sungkono No.106, Pakis, Kec. Sawahan, Surabaya, Jawa Timur 60256

*Penulis Korespondensi

Abstract. *This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue (PAD) and Transfer Revenue from the Central Government on the increase in Regional Expenditure (Belanja Daerah) in East Kalimantan Province during the 2018–2022 period. The research utilizes a quantitative method with multiple linear regression analysis, employing secondary data sourced from regional budget implementation reports (APBD). The results indicate that PAD has a positive and significant effect on Regional Expenditure, meaning that an increase in the region's own revenue contributes to higher spending capacity. Additionally, Transfer Revenue from the Central Government also demonstrates a positive and significant effect on Regional Expenditure. Both variables play an essential role in regional financial growth and public service provision. These findings suggest that optimizing PAD is crucial for improving fiscal independence and reducing dependency on central government transfers. Efficient management of Transfer Revenue is equally vital to ensure the sustainability of regional financial resources. This study offers valuable insights for local governments in East Kalimantan, particularly in their efforts to improve budget allocations, enhance fiscal autonomy, and foster sustainable economic growth. Furthermore, the study serves as a useful reference for developing sound regional financial policies to support the long-term development of East Kalimantan.*

Keywords: APBD; East Kalimantan; PAD; Regional Expenditure; Regional Finance

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terhadap peningkatan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2018–2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan pelaksanaan anggaran daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, artinya peningkatan pendapatan asli daerah berkontribusi pada peningkatan kapasitas belanja. Selain itu, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat juga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Kedua variabel tersebut berperan penting dalam pertumbuhan keuangan daerah dan penyediaan layanan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa optimalisasi PAD sangat penting untuk meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada transfer pemerintah pusat. Pengelolaan Pendapatan Transfer yang efisien sama pentingnya untuk memastikan keberlanjutan sumber daya keuangan daerah. Penelitian ini menawarkan wawasan berharga bagi pemerintah daerah di Kalimantan Timur, khususnya dalam upaya mereka untuk meningkatkan alokasi anggaran, meningkatkan otonomi fiskal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Lebih jauh lagi, penelitian ini berfungsi sebagai referensi yang berguna untuk mengembangkan kebijakan keuangan daerah yang sehat untuk mendukung pembangunan jangka panjang Kalimantan Timur.

Kata Kunci: APBD; BANTALAN; Belanja Daerah; Kalimantan Timur; Keuangan Daerah

1. LATAR BELAKANG

Indonesia mengalami perubahan kepemimpinan nasional pada tahun 1999 yaitu dari Orde Baru menjadi Orde Reformasi dengan menetapkan sistem desentralisasi pemerintahan atau kebijakan otonomi daerah. Sistem ini dimulai dengan disahkan UU No. 22/1999 terkait Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 terkait Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Selanjutnya dilakukan penyesuaian menjadi UU No. 32/2004

perihal Pemerintah Daerah dan UU No. 33/2004 perihal Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, karena regulasi sebelumnya dianggap kurang efektif menyikapi dinamika perkembangan, struktur kenegaraan, serta kebutuhan administrasi daerah. Kemudian, disahkanlah UU No. 23/2014 yang lalu diubah menjadi UU No. 9/2015 mengenai Pemerintahan Daerah.

Otonomi daerah adalah suatu inisiatif dari pemerintah yang memberi kekuasaan kepada daerahnya sendiri untuk mengelola dan mengatur urusan internal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong tumbuhnya kehidupan politik yang demokratis, mengurangi disparitas antar daerah, mempercepat perkembangan ekonomi, serta memperbaiki mutu pelayanan kepada publik. Diharapkan bahwa otonomi daerah dapat memperbaiki efektivitas dalam penyampaian pelayanan kepada masyarakat karena pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan hubungan yang dekat dengan warga, sehingga memungkinkan pemerintah daerah untuk membuat keputusan berdasarkan kewenangannya sendiri tanpa harus meminta izin dari pemerintahan pusat (BPS, 2023).

Dengan penerapan kebijakan desentralisasi, pemerintah lokal diharapkan bisa mengelola urusan pemerintahan, melibatkan komunitas dalam proses pembangunan, serta menciptakan pemerataan dan keadilan dengan memaksimalkan seluruh potensi daerahnya dengan cara yang efisien dan efektif. Meskipun pemerintah daerah telah diberikan kekuasaan itu, pemerintah pusat tetap memiliki kewajiban untuk memantau perkembangan, kemajuan, dan kesejahteraan daerah yang berdampak pada ekonomi negara. Dengan demikian, guna mencapai otonomi daerah, diperlukan modal yang bersumber dari sumber daya daerah yang dikelola oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Kementerian Keuangan Republik Indonesia terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sering disebut dengan APBD. Sesuai dengan ketentuan lokal, badan pemerintah daerah dan anggota dewan perwakilan daerah berkolaborasi untuk merancang anggaran tahunan pemerintah daerah, yang dikenal sebagai APBD. Mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mendanai berbagai proyek dan program yang direncanakan merupakan fungsi penting dari APBD. APBD mencakup semua pemasukan, pengeluaran, serta sumber pembiayaan yang digunakan untuk menyelenggarakan berbagai program dan layanan publik di wilayah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah adalah aspek krusial pada penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. UU No. 33/2004 perihal Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur alokasi pendapatan dan belanja daerah, serta

menetapkan dasar bagi pelaksanaan kewenangan pengelolaan sumber daya fiskal oleh pemerintah daerah (Kementerian Keuangan, 2023). Sebuah aspek yang krusial pada pengelolaan keuangan daerah yaitu pendapatan daerah itu sendiri, yang bersumber dari dua sumber utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat.

Pendapatan Asli Daerah mencakup berbagai elemen, meliputi retribusi, pajak daerah, pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang terpisah, serta beraneka ragam sumber pendapatan legal lainnya. Beberapa sumber penghasilan ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi serta sektor yang menjadi unggulan di setiap wilayah. Di sisi lain, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat merupakan dana yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat memainkan peran utama dalam membantu daerah memenuhi kebutuhan pembangunan dan pembiayaan anggaran belanja daerah (Kementerian Keuangan, 2022). Pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibagi menjadi beberapa kategori. Di antara kategori tersebut terdapat dana perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, terdapat juga pendapatan transfer lainnya dari pemerintah pusat, yang meliputi Dana Otonomi Khusus serta Dana Keistimewaan Yogyakarta (BPS, 2023).

Meskipun banyak daerah di Indonesia memiliki sumber daya yang cukup besar, ada sejumlah daerah yang masih sangat bergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk belanja daerah. Terutama bagi daerah yang memiliki PAD terbatas atau bergantung pada sektor yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar global, seperti sektor pertambangan. Di sinilah pendapatan transfer dari pemerintah pusat berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional pemerintah daerah dan mendukung pembangunan daerah.

Dalam peta pembangunan Indonesia terdapat provinsi yang memiliki berbagai keunggulan yang Dalam peta pembangunan Indonesia terdapat provinsi yang memiliki berbagai keunggulan yang menjadikannya sebagai lokasi yang sangat strategis yaitu Kalimantan Timur. Wilayah ini memiliki beragam kekayaan sumber daya alam yang berlimpah, terutama di bidang energi dan ekstraksi, seperti minyak, gas, dan batubara, yang berperan penting dalam mendukung PAD. Keunggulan ini membuat Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang paling banyak menyumbangkan pendapatan bagi negara. Selain itu, Kalimantan Timur memiliki posisi geografis yang sangat strategis, mempunyai hubungan dagang secara baik pada beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik, menjadikannya sebagai pintu gerbang perdagangan internasional, dan memberi akses secara mudah ke pasar global, serta adanya potensi pengembangan infrastruktur yang semakin berkembang (Fikri & Santosa, 2020). Hal ini

membuka peluang besar bagi provinsi ini untuk mengembangkan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investasi.

Namun, seiring dengan potensi besar yang dimiliki, Kalimantan Timur juga menghadapi sejumlah tantangan dalam pengelolaan keuangannya. Salah satu tantangan terbesar adalah ketergantungan pada sektor pertambangan, yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga pasar global. Seiring dengan penurunan harga batu bara beberapa tahun lalu, pendapatan dari sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, sementara kebutuhan belanja daerah tidak menurun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang besar, daerah ini masih mempunyai ketergantungan secara tinggi pada sektor ekstraktif yang dapat berubah-ubah dengan cepat. Menurut Badan Pusat Statistik (2023), ketika harga komoditas menurun, PAD yang diterima oleh pemerintah daerah juga mengalami penurunan yang signifikan, sehingga daerah harus mengandalkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat untuk menutupi kekurangan dana tersebut.

Pada sisi lain, meskipun terdapat upaya untuk menggali potensi sektor lain, seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, dan industri, sektor-sektor ini belum berkembang secara maksimal untuk menutupi kekurangan yang ditinggalkan oleh sektor pertambangan. Dengan demikian, pendapatan transfer dari pemerintah pusat menjadi sangat penting untuk menjaga kesinambungan belanja daerah di Kalimantan Timur. Berbagai program pembangunan daerah, baik infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan, sangat bergantung pada aliran dana dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Bahkan dengan adanya potensi sektor lain, pembangunan daerah masih memerlukan dana tambahan dalam menambah tingkat kesejahteraan masyarakat serta meminimalisir kesenjangan pembangunan antar daerah (Fikri & Santosa, 2020).

Lebih lanjut, fenomena ini semakin menarik untuk diteliti mengingat peran penting pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam mengisi kekosongan anggaran yang tidak dapat dipenuhi oleh PAD. Di Kalimantan Timur, selain sumber daya alam yang melimpah, faktor lainnya adalah aliran transfer yang relatif besar dari pemerintah pusat yang mendukung berbagai program pembangunan daerah. Namun, ketergantungan ini menjadi sebuah tantangan jika sumber daya alam yang menjadi kontributor utama PAD tidak mampu bertahan dalam jangka panjang atau mengalami penurunan.

Kalimantan Timur juga menghadapi tantangan dalam mengembangkan sektor-sektor lain yang dapat mendiversifikasi PAD. Potensi sektor pariwisata yang besar di Kalimantan Timur belum sepenuhnya dimanfaatkan. Meskipun demikian, pemerintah daerah terus berusaha untuk menaikkan sektor pariwisata dan sektor-sektor baru, seperti perhotelan,

perawatan, dan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan (Bappenas, 2023).

Namun, meskipun ada potensi tersebut, pengelolaan keuangan daerah tetap bergantung pada bagaimana pemerintah daerah dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor-sektor yang ada dan mengelola pendapatan transfer secara bijaksana. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis pengaruh pendapatan dari pemerintah pusat terhadap belanja daerah, agar pemerintah daerah bisa merencanakan pengelolaan keuangan dengan lebih baik dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah di Kalimantan Timur. Sehingga, penulis memutuskan untuk memberi judul: "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terhadap Peningkatan Belanja Daerah di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2022".

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Keuangan Daerah

Keuangan daerah melibatkan segala proses terkait perencanaan, perolehan, pengelolaan, serta pemanfaatan sumber daya keuangan oleh pemerintahan daerah dalam pelaksanaan inisiatif dan kewenangan pembangunannya. Menurut ketentuan UU No. 23/2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan pada tingkat regional dilakukan secara mandiri sesuai dengan potensi wilayahnya untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Pengelolaan keuangan daerah mempunyai tujuan memperbaiki pelayanan publik serta memajukan pembangunan daerah. Guna meningkatkan pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan optimal guna memaksimalkan sumber daya keuangan yang tersedia.

Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat adalah dua kategori utama di mana sumber pendapatan daerah secara umum dipisahkan. Pengelolaan yang efektif dari kedua jenis pendapatan tersebut sangat penting untuk mendukung alokasi belanja daerah dan pelaksanaan pembangunan, sehingga dapat memperkuat kesejahteraan dan kualitas pelayanan masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah

Seluruh penerimaan yang berasal dari potensi ekonomi lokal yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan daerah serta UU yang berlaku secara kolektif disebut sebagai Pendapatan Asli Daerah atau PAD. Sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Ayat 18 UU No. 33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diterima daerah dari pungutan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku. Sementara dalam Pasal 31 UU No. 12/2019 perihal Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa PAD yang telah diatur secara sah dalam peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya, pemerintahan daerah sedang berusaha meningkatkan pendapatan daerah melalui tiga pendekatan utama: (1) Intensifikasi adalah langkah dalam menaikkan tingkat PAD melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara lebih efisien. Maksudnya adalah melakukan peningkatan dalam proses pengambilan. (2) Ekstensifikasi yaitu memperluas cakupan subjek dan objek pajak bertujuan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. (3) Peningkatan pelayanan masyarakat sangatlah penting karena saat ini masyarakat memandang pembayaran pajak dan retribusi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak dan kewajiban mereka kepada negara. Oleh sebab itu, penting untuk mendalami lebih lanjut model layanan yang bisa memuaskan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 23/2014 mengenai Pemerintahan Daerah, terdapat komponen utama PAD:

a. Pajak Daerah

Pajak Provinsi meliputi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, Pajak rokok

Pajak Kabupaten/Kota meliputi: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerang jalan, Pajak mineral bukan logam dan batuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

b. Retribusi Daerah

Pendapatan daerah berasal dari layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Dengan ungkapan lainnya, retribusi daerah merujuk pada pajak yang berhubungan dengan layanan atau fasilitas yang disediakan secara langsung dan jelas, termasuk di dalamnya pajak perawatan kesehatan, pajak layanan kebersihan, pajak jasa pemakaman, pajak perusahaan pengolahan air limbah, serta sejenisnya.

Berdasarkan ketentuan pada UU No. 28/2009, retribusi daerah yaitu pembayaran yang dibebankan pemerintah daerah untuk layanan atau perizinan khusus yang diatur atau diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat maupun perusahaan.

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Berdasarkan ketentuan UU No. 33/2004 mengenai Perimbangan Keuangan, dana perimbangan ialah dana yang berumber dari APBN dengan tujuan didistribusikan ke daerah demi mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dengan kata lain, dalam upaya mendorong kebijakan desentralisasi fiskal serta pemerataan pertumbuhan nasional, pemerintah pusat menyediakan dana untuk pemerintah daerah yang disebut sebagai Pendapatan Transfer. Dana ini bertujuan untuk membantu daerah yang memiliki PAD rendah dalam mendanai layanan publik dan pembangunan.

Beberapa elemen penting yang tercakup dalam pendapatan transfer atau dana perimbangan ini, yakni: (1) Dana Alokasi Umum. (2) Dana Alokasi Khusus. (3) Dana Bagi Hasil. Berdasarkan UU No. 6/2014 mengenai Dana Desa, transfer pemerintah pusat lainnya terdiri dari: (a) Dana Otonomi Khusus. (b) Dana Keistimewaan Yogyakarta

Belanja Daerah

Belanja Daerah merujuk pada seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah guna melaksanakan tugas resmi, memberikan kepada layanan publik, serta mendukung pembangunan di wilayahnya, baik secara rutin maupun investasi jangka panjang. Tercantum dalam PP No. 12/2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah harus direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, serta dilaporkan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

Permendagri No. 21/2011 telah menetapkan bahwasanya Belanja Daerah merujuk dari kewajiban pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi penurunan aset bersih serta tercatat pada laporan pelaksanaan anggaran secara resmi. Pembelanjaan daerah dibagi berdasarkan jenis belanja (klasifikasi ekonomi), lembaga, serta fungsinya. Pembagian kategori pengeluaran berdasarkan PP No. 71/2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan dalam keperluan pelaporan keuangan ialah: (1) Belanja Operasional. (2) Belanja Modal. (3) Belanja Tidak Terduga. (4) Belanja Transfer

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Sebagai cerminan kemandirian daerah, besar kecilnya belanja daerah sangat bergantung pada besarnya PAD. Daerah yang mampu memaksimalkan sumber pendapatannya akan memiliki kapasitas belanja lebih besar, sehingga dapat lebih fleksibel dalam menjalankan program tanpa bergantung sepenuhnya pada pengalihan dana dari pemerintah pusat. Maka, peningkatan PAD menjadi salah satu ukuran yang paling penting dalam mengevaluasi tingkat kemandirian keuangan daerah dan keberhasilan implementasi otonomi daerah.

Pengaruh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah

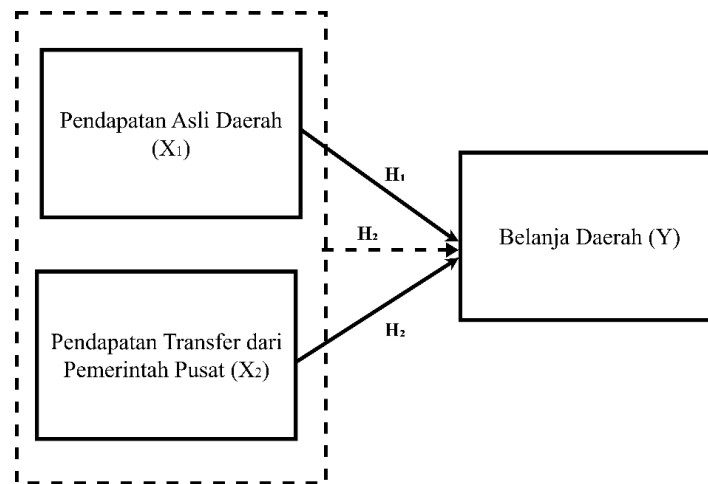
Jumlah dana transfer yang diterima suatu daerah sangat mempengaruhi kapasitas belanja daerah tersebut. Ketika transfer dari pusat meningkat, kapasitas pemerintah daerah untuk membiayai program-program publik juga bertambah, yang memungkinkan pengalokasian anggaran lebih besar untuk pembangunan dan layanan masyarakat dalam satu periode anggaran. Sebaliknya, jika Pendapatan Transfer berkurang, Belanja Daerah akan terbatas, yang berdampak pada pembiayaan program-program prioritas di wilayah tersebut. Oleh karena itu, pengalihan dana dari pusat memegang peranan penting dalam menopang penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah, terutama bagi wilayah-wilayah yang mempunyai PAD yang terbatas.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah

Optimalisasi kedua sumber pendapatan menjadi sangat krusial untuk memenuhi peningkatan kebutuhan infrastruktur dan layanan publik. Karena itu, pemahaman mendalam mengenai PAD serta Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah sangat penting sebagai dasar dalam menyusun kebijakan fiskal yang efektif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan daerah.

Kerangka Konseptual

Maka kerangka konseptual yang diperoleh mengenai hubungan antara variabel PAD dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat terhadap Belanja Daerah dapat diuraikan seperti berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual.

Sumber : Data diolah, 2024

Keterangan:

—————→ = Parsial
 - - - - - → = Simultan

Variabel bebas:

X₁ : Pendapatan Asli Daerah

X₂ : Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

Variabel terikat:

Y : Belanja Daerah

Kerangka konseptual penelitian ini bersandar pada asumsi bahwa PAD dan Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat memiliki peran signifikan dalam menentukan kapasitas Belanja Daerah. Daerah dengan PAD yang tinggi umumnya memiliki daya dukung fiskal yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pembangunan secara mandiri. Sedangkan, Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dirancang untuk mendukung daerah-daerah dengan kapasitas PAD yang lebih rendah, sehingga tetap mampu memenuhi kebutuhan pembangunannya dan menjalankan fungsi pelayanan publik.

The research model or framework is intended to further clarify the essence of the discussion of previous research results and the theoretical basis used in the research, including the relationship between influential variable (Dewi, Rina, Zuhro, Diana, et al. 2024:142-160). The research design is a plan to determine the resources and data that will be used to be processed in order to answer the research question. (Asep Iwa Soemantri, 2020:5). Standard of the company demands regarding the results or output produced are intended to develop the company. (Istanti, Enny, 2021:560). Time management skills can facilitate the implementation

of the work and plans outlined. (Rina Dewi, et al. 2020:14). Saat mengumpulkan sumber data, peneliti mengumpulkan sumber data berupa data mentah. Metode survei adalah metode pengumpulan data primer dengan menggunakan pertanyaan tertulis(Kumala Dewi, Indri et all, 2022 : 29). The Research model or framework is intended to further clarify the essence of the discussion of previous research result and the theoretical basis in the research, including the relationship between influential variables. (Enny Istanti, et al. 2024 : 150). This research will be conducted in three phases : measurement model (external model), structural model (internal model), and hypothesis testing. (Pramono Budi,et al., 2023 ; 970)

3. METODE PENELITIAN

Uji Normalitas

Untuk memastikan apakah model regresi linier yang mencakup variabel bebas dan terikat mendapatkan distribusi data normal, penelitian ini menerapkan uji normalitas. Data bisa dinilai normalitasnya menggunakan histogram dan grafik *probability plot* untuk membandingkan data yang diamati dengan distribusi normal yang serupa. Tetapi, penafsiran yang hanya didasarkan pada histogram dan grafik *probability plot* dapat menyebabkan kesalahan, terutama pada sampel yang sedikit. Maka, menggunakan perhitungan statistik dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* merupakan pendekatan yang lebih tepat. Uji *Kolmogorov-Smirnov* digunakan dalam penelitian ini pada tingkat signifikansi sebesar 5%. Dapat diasumsikan bahwa data terdistribusi secara normal jika nilai signifikansi dari hasil uji $> 0,05$ (Ghozali, 2011).

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2011), tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menentukan apakah terdapat hubungan antara variabel bebas dalam model regresi. Dalam sebuah model regresi yang baik, variabel bebas seharusnya tidak berkorelasi satu sama lain. Untuk mengidentifikasi multikolinearitas, kita dapat mengamati nilai toleransi dan faktor inflasi varian (VIF).

Uji Autokorelasi

Dalam model regresi linier, uji autokorelasi digunakan untuk mengevaluasi kemungkinan hubungan antara kesalahan pada suatu waktu tertentu dan kesalahan pada periode sebelumnya. Kehadiran autokorelasi dalam model bisa membuat varians sampel kurang mampu mencerminkan varians populasi secara akurat (Ghozali, 2011: 110).

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam varians residual antarobservasi dalam model regresi. Jika varians sisa tetap sama di setiap pengamatan, maka dikenal sebagai homoskedastisitas. Sebaliknya, jika variansnya bervariasi akan terjadi heteroskedastisitas. Dalam model regresi yang bagus, seharusnya tidak ada heteroskedastisitas, melainkan menunjukkan adanya homoskedastisitas. Data cross-sectional sering kali menunjukkan adanya heteroskedastisitas dikarenakan variasi ukuran data yang bervariasi, baik kecil, sedang, maupun besar (Ghozali, 2013: 139). Time management skills can enhance the execution of established work and plans. (Rina Dewi et al. , 2020, p. 14). This study was conducted in three phases: the measurement model (representing the external model), the structural model (representing the internal model), and hypothesis testing. (Pramono Budi et al. , 2023, p. 970) Kolaborasi antara pemerintah, sektor industri, lembaga penelitian, dan masyarakat sipil dalam merumuskan implementasi, serta adanya komitmen dan kerja sama yang solid dari seluruh pemangku kepentingan, merupakan kunci keberhasilan dari upaya ini. (Gazali Salim et al. 2024 : 63) The SERVQUAL model quantifies the disparity in value assigned by customers to each pair of statements concerning expectations and perceptions. (Diana Zuhro et al. 2024 : 98) The Research model or framework serves to elucidate the nature of discussions surrounding prior research findings and theoretical foundations, including the interrelationships among influential variables. (Enny Istanti, et al. 2024 : 150)

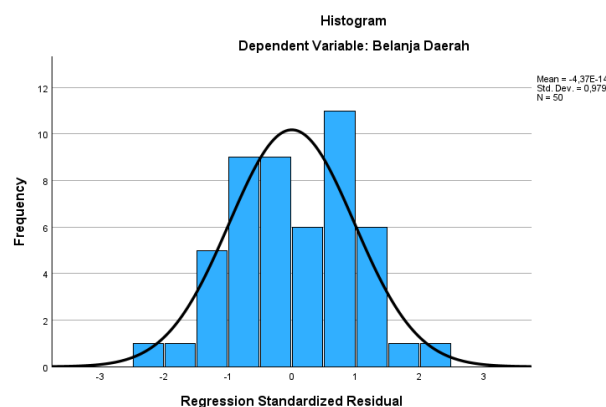
4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Model dan Pengujian Hipotesis

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, penting untuk terlebih dahulu menguji asumsi-asumsi klasik yang ada. Pengujian tersebut berguna untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang dipergunakan layak untuk diolah lebih lanjut. Berikut ini hasil pengujian yang sudah dilakukan:

Uji Normalitas

Uji normalitas data dilaksanakan untuk menentukan apakah variabel dependen dan independen dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas yang dilakukan:



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas (Histogram).

Sumber : Data diolah oleh SPSS, 2024

Histogram residual menunjukkan distribusi residual standar dari model regresi dengan variabel dependen Belanja Daerah. Berdasarkan grafik di atas, distribusi residual terlihat mendekati pola distribusi normal, yang dapat dilihat dari bentuk kurva lonceng yang hampir simetris di sekitar nilai nol.

Uji Multikolonieritas

Uji multikolinearitas sangat penting untuk menganalisis apakah terdapat korelasi di antara variabel independen dalam persamaan regresi. Sebuah model regresi yang baik seharusnya bebas dari korelasi antar variabel independen. Untuk menentukan apakah terdapat multikolinearitas dalam model regresi, dapat memeriksa nilai toleransi dan VIF. Jika nilai toleransi $> 0,10$ atau $VIF < 10,00$, maka dapat dipastikan tidak ada masalah multikolinearitas. Berikut hasil uji:

Tabel 1. Hasil Uji Multikolonieritas.

Coefficients ^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	2,374	,483		4,917	<,001	
	Pendapatan Asli Daerah	,163	,019	,400	8,563	<,001	,860 1,163
	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat	,665	,043	,730	15,636	<,001	,860 1,163

Sumber : Data diolah oleh SPSS, 2024

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilaksanakan untuk menentukan adanya atau tidaknya korelasi dalam suatu model regresi linier. Suatu model regresi dianggap baik apabila model tersebut bebas dari

autokorelasi. Apabila terdapat korelasi, hal ini menunjukkan adanya permasalahan autokorelasi. Uji yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. Ketentuan Nilai *Durbin-Watson* (DW).

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_L$
Tidak ada autokorelasi positif	Tidak ada keputusan	$d_L \leq d \leq d_U$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_L < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tidak ada keputusan	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak ditolak	$d_U < d < 4 - d_U$

Ket: d : *Durbin Watson*, d_U : *Durbin Watson upper*, d_L : *Durbin Watson lower*

Sumber : Data diolah, 2024

Dengan hasil pengujian menggunakan SPSS didapatkan hasil berikut ini:

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,955 ^a	,912	,908	,054342	1,818

Sumber : Data diolah oleh SPSS, 2024

Uji Heteroskedastisitas

Dari analisis terhadap gambar tersebut, dapat disimpulkan bahwa titik-titik data terdistribusi secara acak, dengan sebaran yang merata di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Selain itu, tidak terdapat pola tertentu yang teratur, dan titik-titik tersebut tidak terfokus pada beberapa lokasi saja, baik di atas maupun di bawah. Sebaran titik-titik data juga tidak menunjukkan pola gelombang yang mengembang, menyempit, dan kemudian mengembang kembali. Berdasarkan temuan ini, tidak mengalami heteroskedastisitas dan, oleh karena itu, dianggap layak untuk diterapkan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda dilaksanakan untuk mengidentifikasi sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut hasil uji analisis:

Tabel 4. Hasil Uji R-Square.

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,955 ^a	,912	,908	,054342	1,818

Sumber : Data diolah oleh SPSS, 2024

Berdasarkan pedoman tabel tersebut, nilai R-kuadrat (R^2) yang diperoleh mencapai 0,912, atau setara dengan 91,2%. Angka ini menunjukkan bahwa variabel bebas, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer dari pemerintah pusat, secara simultan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah di Kalimantan Timur antara tahun 2018 hingga 2022, dengan kontribusi sebesar 91,2%. Sementara itu, sisanya sebesar 8,8% dipengaruhi oleh variabel bebas lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.

		Coefficients ^a		Standardized Coefficients		Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	2,374	,483		4,917	<,001	
	Pendapatan Asli Daerah	,163	,019	,400	8,563	<,001	,860 1,163
	Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat	,665	,043	,730	15,636	<,001	,860 1,163

Berdasarkan hasil tabel analisis regresi yang telah disajikan di atas, pada kolom Unstandardized Coefficients B menjadi nilai konstanta dan koefisien dari persamaan analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 2,374 + 0,163.X_1 + 0,665.X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Belanja Daerah

X_1 : Pendapatan Asli Daerah

X_2 : Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_2$: Koefisien regresi

e : Faktor Gallat

Melalui proses tersebut, karyawan diberikan pelatihan dan pengembangan yang relevan dengan kinerja pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat menjalankan tanggung jawab pekerjaannya dengan sebaik - baiknya. (Abdul Aziz Sholeh et.al. 2024 :82). Memilih merupakan bagian dari suatu upaya pemecahan sekaligus sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu dibutuhkan keputusan pembelian yang tepat (Kristiawati Indriana et.al. 2019 : 28). Kerja sama antara pemerintah, industri, lembaga penelitian dan masyarakat sipil dalam merancang menerapkan, Komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan upaya - upaya tersebut. (Gazali Salim et al. 2024 : 63). The SERVQUAL model includes calculating the difference between the values given by customers for each pair of statements related to expectations and

perceptions (Diana Zuhro et al. 2024 : 98). In a competitive bussiness environment, credit marketing strategies play an important role in customer acquisition and retention. (Mahjudin, et. al. 2025 : 2659 - 2672). Pendekatan penelitian ini adalah keseluruhan proses pemikiran dari penentuan secara luas dari hal-hal yang akan diteliti agar tercapai sebaik-baiknya. (Sutopo, et. al. 2021 : 83 - 92). Promosi yang dilakukan dengan memberikan pengetahuan konsumen terhadap kualitas produk perusahaan sehingga menarik perhatian konsumen untuk menggunakan jasa penyewanya. (Firdaus, Fikri, et al. 2021 : 76 - 82).

5. KESIMPULAN

Pada uji t (X_1) Pendapatan Asli Daerah menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $8,56300 > 2,01174$ dan Sig. $0,000 < 0,050$ maka Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah di Kalimantan Timur selama periode 2018-2022. Pada uji t (X_2) Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat menghasilkan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $15,63600 > 2,01174$ dan Sig. $0,000 < 0,050$ maka Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah di Kalimantan Timur pada tahun 2018-2022. Pada uji F (Y) menghasilkan $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu $243,207 > 3,200$ dan Sig. $0,000 < 0,050$ maka Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah di Kalimantan Timur selama periode 2018-2022.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, L. O. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer terhadap belanja daerah Kota Jayapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 25-41. <https://doi.org/10.55049/jeb.v12i1.69>
- Anggreani, R. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah Kota Parepare (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Anggreini, A. A., Zuhroh, D., Wasesa, T., Wiratna, W., & Sutini, S. (2024). Dampak pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan transfer pemerintah pusat terhadap belanja daerah di Jawa Timur tahun 2018-2022. *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 58-75. <https://doi.org/10.30640/jumma45.v3i2.2947>
- Aziz Sholeh, A., Abdul, et al. (2024). Kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Insolent Raya di Surabaya. *Journal of Management and Creative Business*, 2(1), 82-96. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v2i1.2069>
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2023). Strategi peningkatan pariwisata dan diversifikasi ekonomi daerah. Retrieved October 2024, from <https://www.bappenas.go.id>

- Badan Pusat Statistik. (2023). Laporan keuangan daerah 2023. Jakarta: BPS. Retrieved October 2024, from <https://www.bps.go.id>
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi pemerintahan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, R., Zuhro, D., et al. (2024). Service design performance based on consumer preferences. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(3), 142-160. <https://doi.org/10.61132/ijems.v1i3.131>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2018). Realisasi APBD 2018. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved November 2024, from <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2019). Realisasi APBD 2019. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved November 2024, from <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2020). Realisasi APBD 2020. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved November 2024, from <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). Realisasi APBD 2021. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved November 2024, from <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2022). Realisasi APBD 2022. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Retrieved November 2024, from <https://djpk.kemenkeu.go.id>
- Djaenuri, A. (2012). *Pengelolaan dana transfer untuk pembangunan daerah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Enny, I., Bramastyo, K., I. N. (2020). Implementasi harga, kualitas pelayanan, dan pembelian berulang pada penjualan produk gamis Afifathin. *Ekonomika* 45, 8(1), 1-10. <https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v8i1.180>
- Erlina. (2008). *Standar akuntansi pemerintahan di Indonesia: Penerapan dan tantangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah. *Jurnal EQUITY*, 22(2), 197-214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Fikri, A., & Santosa, R. (2020). *Strategi pengembangan infrastruktur dan perdagangan daerah: Studi kasus Kalimantan Timur*. Jakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Firdaus, F., Fikri, et al. (2021). Kualitas produk dan promosi dalam mempengaruhi keputusan konsumen menggunakan jasa penyewaan produk alat berat. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 1(3), 76-82. <https://doi.org/10.55606/jaem.v1i3.28>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Ekonometrika: Teori, konsep, dan aplikasi dengan SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). *Multivariate data analysis*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Halim, Abdul, & Kusufi. (2014). *Akuntansi keuangan daerah* (4th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Hermawan, A., & Made, I. W. (2016). *Pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah: Implikasi untuk belanja daerah*. Jakarta: PT Gramedia.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07/2013 tentang Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160-163/PMK.07 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Istanti, E., et al. (2024). Service design performance based on consumer preferences. *International Journal of Economics and Management Sciences*, 1(3), 142-160. <https://doi.org/10.61132/ijems.v1i3.131>
- Iwa Soemantri, A., et al. (2020). Entrepreneurship orientation strategy, market orientation and its effect on business performance in MSMEs. *Jurnal EKSPEKTRA Unitomo*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.25139/ekt.v4i1.2163>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jakarta: Kemenkeu. Retrieved November 2024, from <https://www.kemenkeu.go.id>
- Kristiawati, et al. (2019). Citra merek persepsi harga dan nilai pelanggan terhadap keputusan pembelian pada mini market Indomaret Lontar Surabaya. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen (JMM 17)*, 6(2), 27-36. <https://doi.org/10.30996/jmm.v6i02.2994>
- Kumala Dewi, I., et al. (2022). Peningkatan kinerja UMKM melalui pengelolaan keuangan. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 7(1), 23-36. <https://doi.org/10.30996/jea17.v7i01.6551>

- Mahjudin, et al. (2025). Analysis of credit marketing strategy, lending procedures, and service quality on customer satisfaction of rural banks. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(4), 2659-2672. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i4.3296>
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah* (4th ed.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan edisi revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nanang, M. (2011). *Metodologi penelitian kuantitatif: Analisis dan desain penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pramono Budi, I., Istanti Enny, Daengs GS, Achmad, Syafi'i, Bramastyo KN, RM. (2023). Impact of social media marketing and brand awareness on purchase intention in coffee shop culinary in Surabaya. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, 5(6), 968-977. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v6i5.2367>
- Pramono Budi, I., Istanti Enny, Daengs GS, Achmad, Syafi'i, Bramastyo KN, RM. (2023). Impact of social media marketing and brand awareness on purchase intention in coffee shop culinary in Surabaya. *International Journal of Entrepreneurship and Business Development*, 5(6), 968-977. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v6i5.2367>
- Rina Dewi, et al. (2020). Internal factor effects in forming the success of small businesses. *Jurnal SINERGI UNITOMO*, 10(1), 13-21. <https://doi.org/10.25139/sng.v10i1.1463>
- Rina Dewi, et al. (2020). Internal factor effects in forming the success of small businesses. *Jurnal SINERGI UNITOMO*, 10(1), 13-21. <https://doi.org/10.25139/sng.v10i1.1463>
- Salim Gazali, et al. (2024). *Ikan Nomei, Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. 1-98.
- Salim Gazali, et al. (2024). *Ikan Nomei, Merdeka Belajar Kampus Merdeka*. 1-98.
- Septriani, S. (2023). Analisis pengaruh dana perimbangan dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(3), 884-894. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1201>
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif cetakan kedua*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *SPSS untuk penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sutopo, et al. (2021). Peranan prinsip konsistensi dalam metode pengakuan pendapatan terhadap laporan laba rugi pada PT. INDO ZINC DIECASTING di Gresik. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 1(3), 83-92. <https://doi.org/10.55606/jaem.v1i3.33>
- Zuhro, D., et al. (2024). Impact of measurement of service quality using the SERVQUAL method. *Digital Innovation: International Journal of Management*, 1(3), 94-114. <https://doi.org/10.61132/digitalinnovation.v1i3.34>